

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH
PERBATASAN DI KECAMATAN TULIN ONSOI
KABUPATEN NUNUKAN**

YEHESKEL

**eJournalAdministrasi Negara
Volume 4, Nomor 2 , 2014**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **Implementasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan**

Pengarang : Yeheskel

NIM : 0702015197

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 27 Agustus 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

Drs. Guntar Riady, M.Si
NIP. 19500607 197603 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA <u>Drs. M.Z. Arifin, M.Si</u> NIP. 19570606 198203 1 025
Volume : 4	
Nomor : 2	
Tahun : 2014	
Halaman : 1377-1390 (Genap)	

IMPLEMENTASI PEMBAGUNAN DAERAH PERBATASAN DI KECAMATAN TULIN ONSOI KABUPATEN NUNUKAN

Yeheskel¹

Abstrak

Yeheskel: Implementasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Tulin onsoi Kabupaten Nunukan dibawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. H.M, Gunthar Riady, M.Si selaku Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi pembangunan daerah perbatas di Kecamatan Tulin Onsoi dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi pembangunan daerah perbatas di Kecamatan Tulin Onsoi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik penelitian berupa survey, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer untuk mengetahui bagaimana Implementasi pembangunan daerah perbatas di Kecamatan Tulin Onsoi.

Kesimpulannya Implementasi pembangunan daerah perbatas di Kecamatan Tulin Onsoi selama ini belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan fisik dan non-fisik yang ada di Kecamatan Tulin Onsoi. sebagai saran, melihat permasalahan yang ada diharapkan kepada pemerintah daerah memperhatikan perkembangan pembangunan yang ada di perbatasan guna mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Pembangunan Daerah Perbatasan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daerah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain. Wilayah di maksud berdekatan dengan garis batas negara (atau wilayah negara tetangga). Daerah perbatasan dalam kerangka pembangunan, mempunyai dominan penting yaitu pembangunan kesejahteraan dan pembangunan keamanan, dimana pembangunan kesejahteraan memperkuat akan eksistensi keamanan. Oleh karena itu pada hakekatnya pembangunan daerah perbatasan merupakan bagian satu kesatuan dari pembangunan nasional, dengan demikian daerah perbatasan memerlukan kerangka penaganan yang menyeluruh meliputi

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yeheskel6@gmail.com

berbagai sektor pembangunan yang efektif mulai dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, yang di jabarkan melalui kebijakan makro yang oprasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota.

Tujuan pembangunan daerah perbatasan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan keamanan. Masyarakat yang ada di daerah perbatasan pada umumnya mempunyai permasalahan yang multi-kompleks seperti di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, idiologi, infrastruktur dan keamanan oleh karena itu memerlukan kebijakan yang tepat untuk masyarakat yang ada di daerah perbatasan.

Pembangunan daerah perbatasan dalam acuan program pembanguna daerah perbatasan (PROPERNAS) tahun 2000-2004 dalam Bab IX ini lebih pada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Dari acuan tersebut pemerintah lebih memperhatikan dalam melaksanakan pembangunan daerah perbatasan.

Keterbelakangan daerah perbatasan memang masih belum mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan daerah perbatasan dan lebih mengarah kepada daerah-daerah padat penduduk, aksesnya mudah dan potensial, sedangkan kebijakan pembanguan bagi daerah- daerah terpencil, dan tertinggal masih belum di prioritaskan sehingga pembanguan daerah perbatasan mempunyai banyak permasalahan dalam berbagai bidang pembanguan di Indonesia, dimana permasalahan pembangunan daerah perbatasan selama ini pada umumnya adalah permasalahan politik, permasalahan ekonomi, idiologi, sosial budaya.

Untuk itu perlu dilakukan usaha memperkuat fungsi wilayah perbatasan negara Republik Indonesia khususnya di provinsi Kalimantan Utara, melalui pembangunan sumber daya manusia, yang dirasakan semakin mendesak kebutuhannya. Selain untuk mengevaluasi berbagai unsur penting dari faktor indek pembangunan sumber daya manusia, sosial, budaya dan perekonomian masyarakat yang di nilai sebagai faktor penunjang penting dalam pengembangan daerah perbatasan, yang pada jangka panjang, merupakan kebijakan untuk memperkuat dan memperkokoh kedaulatan negara.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan terdapat fenomena permasalahan yang sangat memperhatikan terutama masalah tingkat kesejahteraan masyarakat sangat renda dan minimnya pembangunan infrastruktur. Namun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Tulin Onsoi yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan.

Kecamatan Tulin Onsoi menurut etnisnya sekarang masih bersifat homogen yakni mayoritas suku dayak agabag dan merupakan penduduk asli di

Kecamatan Tulin Onsoi, Penduduk yang berada di daerah ini pada umumnya hidup dalam kondisi keterbelakang dan kemiskinan, baik secara sosial, pendidikan, ekonomi maupun kultural. Pada kehidupan sosialnya mereka memiliki karakteristik kelembagaan yang khas, dan berbeda dengan karakteristik kelembagaan masyarakat modern, salah satu cirinya adalah solidaritas internal kelompok yang sangat kuat, jumlah warga yang relatif kecil, spirit kebersamaan dan kepatuhan terhadap ketua begitu kuat. Jika dilihat dari segi pendidikan masyarakat di Kecamatan ini mayoritas pendidikan SD sampai dengan SMA.

Pada kegiatan ekonomi mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tulin Onsoi mayoritas bertani, umumnya jenis tanaman yang ditanam adalah singkong (yang merupakan makanan pokok masyarakat setempat). Beberapa pekerjaan lain diantaranya adalah guru, pedagang, dan menjadi kuli di perusahaan.

Kebudayaan yang berada di Kecamatan ini sudah mulai bergeser, hal ini dikarenakan begitu mudahnya akses untuk melintas batas secara illegal yang masuk maupun keluar Indonesia untuk mencari mata pencarian, sehingga kegiatan-kegiatan budaya yang rutin di jalankan (upacara-upacara adat) sudah mulai ditinggalkan.

Jika di lihat dari persoalan-persoalan tersebut dan observasi di lapangan di temukan beberapa permasalahan yang lebih menonjol di daerah Kecamatan Tulin Onsoi, yaitu :

- 1. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang ada di daerah perbatasan.*
- 2. Rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM)*
- 3. Tingkat kesehatan sangat rendah.*
- 4. Kesenjangan sarana dan prasarana transportasi menuju perbatasan sangat sulit dijangkau.*

*Berangkat dari permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul: **Implementasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.***

Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan?*
- 2) Faktor-faktor yang menghambat Implementasi pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan?*

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Implementasi pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan?*
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan?*

Kegunaan Penelitian

- 1) Teoritis, yaitu Melalui dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan serta bahan pertimbangan oleh pihak yang berwenang, dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah perbatasan khususnya di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.
- 2) Praktis, yaitu Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, dalam kajian penelitian tentang implementasi pembangunan daerah perbatasan.

Kerangka Dasar Teori

Teori dan Konsep

Bahwa penelitian itu membutuhkan teori dan konsep sebagai landasan penelitian, berikut penulis uraikan beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan variabel penelitian.

Definisi Implementasi

Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004:39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pengertian Kebijakan

Menurut Ealau dan Prewitt (dalam Suharto, 2005:7), kebijakan adalah sebuah ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Karakteristik kebijakan

James Anderson dan kawam-kawannya dalam (Said Abdul Wahab, 2002:41) mengemukakan beberapa karakteristik dari kebijakan, yaitu:

- 1) Setiap kebijakan mutlak memiliki tujuan, tidak hanya sekedar asal buat atau kebetulan karena ada kesempatan membuatnya.
- 2) Suatu kebijakan tidak berdiri-sendiri, terpisah dari kebijakan lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
- 3) Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang diniatkan akan dilakukan pemerintah.
- 4) Kebijakan dapat berbentuk negative (melarang) dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- 5) Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki wewenang untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Proses Kebijakan Publik

menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda
2. Tahap formulasi kebijakan.
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap implementasi kebijakan
5. Tahap evaluasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (2005:26) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu, atau kelompok, yang dimaksudkan mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan, hal ini termasuk upaya mentransformasikan keputusan kedalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang ditetapkan dalam keputusan.

Pembangunan

Menurut Soekanto (2006:358) pembangunan merupakan suatu proses perubahan segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rancangan tertentu.

Faktor Penghambat Pembangunan

Menurut Siagian (2005:81) berpendapat bahwa tidak ada satupun strategi pembangunan yang cocok digunakan oleh semua negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraan material pada warganya hal ini di sebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Tingkat pendidikan masyarakat
- 3) Luas wilayah kekuasaan negara
- 4) Topografi wilayah kekuasaan negara
- 5) Jenis dan jumlah kekayaan negara yang dimiliki
- 6) Sistematis politik yang berlaku dinegara yang bersangkutan
- 7) Persepsi para pengambil keputusan tentang prioritas pembangunan yang berkaitan dengan sifat keterbelakangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tujuan Pembangunan

Adapun tujuan dalam pembangunan menurut Zamhariri (2008:23) dapat dirumuskan, sebagai berikut :

- 1) Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
- 2) Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat dan masyarakat umum.
- 3) Terlaksananya sejumlah investigasi dalam berbagai sektor.
- 4) Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Konsep Pembangunan

Menurut Soetomo (2008:22), pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut

dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal.

Pembangunan Fisik dan Non-fisik

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah. Pembangunan nasional yang diselenggarakan dewasa ini merupakan apresiasi dari penyelenggaraan pembangunan di setiap daerah. Pembangunan yang diselenggarakan dalam era otonomi daerah saat ini tidak lepas dari semangat proklamasi dan perjuangan bangsa yang mengendaki adanya pemerataan pembangunan di segala bidang. Hal tersebut terimplementasi melalui program-program pembangunan fisik dan non fisik.

Pembangunan Daerah perbatasan

Menurut Suko (2004:11) mengatakan bahwa” Tujuan pembangunan wilayah perbatasan adalah untuk meningkatkan tarah hidup masyarakat yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keamanan, dan pertahanan. Dari pendapat ini memberikan suatu konsepsi bahwa masyarakat yang ada di daerah perbatasan pada umumnya di hadapkan pada permasalahan yang multikompleks seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, idiologi, infrastruktur dan keamanan.

Konsep Daerah Perbatasan

Menurut Suko (2004:7) mengatakan bahwa” Daerah perbatasan merupakan tempat pelintasan batas penduduk, barang dan berbagai informasi. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat dan kepentingan yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan ketahanan dan keamanan.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan dengan penelitian ini, maka akan dikemukakan definisi konsepsional yang berhubungan dengan pembangunan daerah perbatasan.

Pembangunan adalah suatu upaya untuk memperbaiki sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik, secara terencana dan berkelanjutan yang harus memperhatikan azas pemerataan dan keadilan.

Pembangunan daerah perbatasan adalah suatu upaya untuk merubah kondisi masyarakat perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pembangunan. Oleh sebab itu melalui otonomi daerah pemerintahan

daerah mengupayakan pembangunan di daerah perbatasan, agar tujuan dari pembangunan perbatasan terealisasi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berkenaan dengan judul skripsi ini, yaitu “Implementasi Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan”, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif

Menurut Moleong (2000:6) mengemukakan bahwa deskriptif Kualitatif adalah” Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Fokus Penelitian

1. Implementasi pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten yang dilihat dari :
 - 1) Pembangunan fisik
 - a. Infrastruktur jalan
 - b. Pendidikan
 - c. Kesehatan
 - d. Transportasi
 - e. Telekomunikasi
 - (1) Pembangunan non fisik
 - a. Sumber daya manusia (SDM)
 - b. Pelestarian budaya
 - c. Ekonomi Masyarakat
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis lakukan adalah di kantor Perusahaan daerah Air Minum kota Samarinda.

Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data atau key informan dan dalam pengumpulan data adalah Pejabat pemerintah, dalam hal ini orang-orang yang berwenang secara formal dikalangan pemerintah Kecamatan Tulin Onsoi. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Tokoh-tokoh masyarakat
2. Ketua adat

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi atau Pengamatan
 - b. Wawancara
 - c. Penelitian Dokumen

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Kecamatan Tulin Onsoi

1) Letak Georafis

Secara georafis Kecamatan Tulin Onsoi merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang berada pada garis perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia, yang terletak di daratan Pulau Kalimantan. Batas-batas wilayah Kecamatan Tulin sebagai berikut.

Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei. Menggaris, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lumbis Ogong, di sebelah Utara berbatasan dengan Sabah Malaysia, dan disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sebuku. Luas wilayah Kecamatan Tulin Onsoi Keseluruhan adalah 2.941,28 km² yang terdiri dari 12 Desa.

2) Pemerintahan.

Secara administrasi kecamatan tulin onsoi terdiri dari 12 desa, semua desa terletak di wilayah bukan pesisir. dari 12 desa tersebut 2 (Dua) desa termasuk dalam klasifikasi desa swasembada, yaitu desa sanur dan desa makmur. 1 (Satu) desa termasuk dalam klasifikasi desa swakarya, yaitu desa sekikilan. dan sisanya, sebanyak 9 (Sembilan) desa termasuk dalam klasifikasi desa swadaya, yaitu desa tau baru, desa naputi, desa balatikan, desa tinampak I, desa tinampak II, desa salang, desa tembalang, desa kalun sayan, dan desa semunad.

3) Keadaan Penduduk

jumlah penduduk Kecamatan Tulin Onsoi sebanyak 7.920 jiwa yang terdiri dari 4.194 laki-laki dan 3.726 perempuan.

4) Pendidikan

Dimana pada tahun 2012 di Kecamatan Tulin Onsoi ada 8 (Delapan) Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah murid keseluruhan sebanyak 1.035 orang dengan tenaga pengajar/guru berjumlah 54 orang. Untuk Sekolah tingkat SLTP Negeri ada 2 (Dua) Sekolah dengan jumlah murid keseluruhan berjumlah 484 orang dan jumlah tenaga pengajar/guru 22 orang. Sedangkan untuk tingkat SLTA yakni SMKN I Tulin Onsoi dengan jumlah siswa keseluruhan 190 orang dengan tenaga pengajar/guru berjumlah 14 orang.

(5) Kesehatan

Pada tahun 2012 sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Tulin Onsoi 1 (Satu) pukesmas umum dengan tenaga medis 8 (Delapan) orang, dan 4 (Empat) pukesmas pembantu, dengan tenaga medis 4 (Empat) orang. Dokter umum dan dokter gigi masing-masing 1 (Satu) Orang yang berpusat di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.

(6) Ekonomi Masyarakat

Pada kegiatan ekonomi mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tulin Onsoi mayoritas bertani. Umumnya jenis tanaman yang ditanam adalah singkong (yang merupakan makanan pokok masyarakat setempat khusus suku dayak agabag).

(7) Transportasi

Jika dilihat dari sarana transportasi darat dan sungai merupakan pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan baik itu dari desa kedesa yang lain, maupun dari desa ke ibu kota Kecamatan, menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, Namun infrastruktur jalan darat di Kecamatan Tulin Onsoi belum maksimal karena masih ada jalan yang belum diaspal/semenisasi sehingga memperlambat akses dan butuh waktu yang lamah ke ibu kota kecamatan. Hal ini berdampak pada desa-desa yang berada pada garis perbatasan.

(8) Telekomunikasi

Menurut jenis komunikasi yang paling domina di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan adalah telepon genggam/HP, dan Surat Pos. Namun masyarakat dikecamatan ini mengalami kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan telepon genggam dikarenakan kurangnya pembangunan tower/menara telekomunikasi, sehingga desa-desa yang berada di garis perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia mengalami kesulitan dalam mendapat informasi.

Hasil Penelitian

Implementasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Tuli Onsoi

Program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan selama ini dalam rangka percepatan pembangunan khususnya didaerah Kecamatan Tulin Onsoi belum semuanya di implementasikan seperti pembangunan, yaitu:

1. Sarana dan prasarana jalan.
2. Saranan dan prasarana air dan penerbagan.
3. Ekonomi dan perdagangan.
4. Sumber daya alam (SDA).
5. Sosial ekonomi.

Kemudian program pembangunan yang terlaksana selama ini di Kecamatan Tulin Onsoi dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah perbatasan adalah sebagai berikut:

6. Pengakutan barang pokok ke daerah perbatasan.
7. Proyek pembangunan jalan dan jembatan sei-tulin.
8. Pemberdayaan social komonitas adat (KAT) dan masyarakat miskin (46ha) daerah perbatasan.
9. Studi kelayakan dan penyusunan master plan jaringan perbatasan Kabupaten Nunukan.

Program bembangunan yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Tulin Onsoi, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD adalah :

1) Pembangunan fisik:

1. Gedung kantor camat
2. Gedung kepala desa
3. Gedung SD
4. Gedung SMP
5. Gedung SMK
6. Gedung pukesmas umum
7. Gedung puskesmas pembantu
8. Jembatan besi sei-tulin
9. Gedung balai adat
10. Kantor pemerinta desa
11. Pengadaan listrik tenaga surya (PLTS)

2) Pembangunan Non fisik:

1. Pengadaan tenaga guru
2. Pengadan tenaga medis
3. Penyeluhan kesehatan

Faktor Penghambat Implementasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi.

Georafis

1. Keterbelakangan wilayah.
2. Kondisi alam yang berat dilalui

Perhubungan

Transportasi sulit dijangkau

Pertanian

1. Produktivitas masyarakat renda
2. Pola bercocok tanam masih tradisional (lading berpindah-pndah)
3. Pengetahuan tentang pertanian rendah.
4. Terbatasnya tenaga ahli
5. Sarana dan prasaranan produksi masih terbatas.

Pendidikan

1. Rendahnya tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolakan anaknya.
2. Rendahnya kemampuan orang tuanya untuk menyekolakan anaknya.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk pengembangan keterampilan yang sesuai dengan potensi yang ada.

Kesehatan

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dibidang kesehatan.
2. Terbatasnya tenaga medis sehingga pelayanan kesehatan terhambat
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hidup sehat.
4. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang perumahan yang sehat dan lingkungan yang bersih.

Industri

1. Bahan baku yang tersedia belum dimanfaatkan untuk pengembangan rakyat.
2. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan di sector industry.
3. Kurangnya modal usaha bagi kelompok tani yang berusaha di sektor industri.
4. Kurang terbukanya pemasaran untuk asil industri masyarakat.

Pemerintahan

1. Belum tersedianya fasilitas aparat tingkat desa di daerah perbatasan.
2. Sarana dan prasarana pendukung kelancaran untuk menunjang kelancaran kerja pemerintah desa.
3. Kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa relative rendah sehingga kurang mampu melaksanakan tugasnya di bidang administrasi pemerintahan desa dan pembangunan.

Pembahasan

Implementasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi.

Implementasi kebijakan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi selama ini baik dari peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jauh dari harapan masyarakat yang beradab di daerah perbatasan khususnya desa-desa yang bersentuhan langsung dengan garis perbatasan, hal itu dapat dilihat bahwa pembanguna yang dilaksana sumber dari pembiayaan anggaran APBN itu hanya ada 4 (Empat) program pembangunan saja, itu pun tidak sepenuhnya terimplementasikan, sedangkan desa-desa yang bersentuhan langsung garis perbatasan itu belum tersentuh oleh pembangunan yang lebih optimal.

Oleh karena itu untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah perbatasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memfokuskan kebijakan pembanguna daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan, yaitu :

1. Pembangunan fisik:
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana jalan

- 2) Pembukaan akses transportasi
 - 3) Peningkatan mutu pendidikan
 - 4) Peningkatan mutu kesehatan
 - 5) Ekonomi masyarakat
2. Pembanguna non fisik:
- 1) Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
 - 2) Pelestarian budaya

Faktor Penghambat Implementasi Pembangunan Daerah di Kecamatan Tulin Onsoi.

Dalam rangka pembangunan di Kecamatan Tulin Onsoi ini, kebijakan yang diwujudkan pemerintah mengalami berbagai hambatan-hambatan yang justru memperlambat proses pembangunan. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang menghambat di dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi perlu kebijakan pembangunan yang berorientasi pada dua hal :

1. Skala prioritas kebijakan
2. Kebijakan yang komprehensif (menyeluru)
kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pembangunan sebagai berikut:

1. Membuka akses transportasi
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
4. Menyediakan sarana dan prasarana dalam berbagai sektor publik.
5. Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat.
6. Pemberdayaan terhadap sumber daya alam.
7. Pendayaguna peluang dan potensi yang ada
8. Pengawasan terhadap sumber daya alam di daerah perbatasan.
9. Perluh kebijakan khusus terhadap pembangunan di daerah perbatasan, dan di implementasikan.

Kemudian kebijakan yang diambil harus menyeluruh pada sekala prioritas.

Penutup

Kesimpulan

1. Kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pembangunan daerah perbatasan belum sepenuhnya terlaksana di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan. Yang dilihat dari pembangunan fisik (Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, telekomonikasi, transportasi), dan pembangunan non-fisik (Sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, plestarian budaya)

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang terjadi, seperti:
 - a. Kondisi alam.
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Saran

1. Perlunya memprioritaskan kebijakan pembangunan fisik dan non-fisik secara menyeluruh di daerah perbatasan terkhususnya Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah daerah harus lebih sering melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap pembangunan di daerah perbatasan khususnya Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.
3. Pembinaan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kecamatan Tulin Onsoi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana berbagai sektor pembangunan.

Daftar pustaka

- Arikunto, Suharsimi 1997. *Prosedur Penelitian* (Edisi Revisi): Suatu pendekatan Praktek, Renika Cipta : Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin 2002. *Analisis Kebijakan*, dari formulasi keimplementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bina Aksara.
- Budi Winarno 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Efendi Bachtiar, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan: Sebuah konsep tentang penyelenggaraan otonomi daerah secara adil untuk mengatasi kesenjangan dan memperkuat ketahanan nasional*, Kurnia Kalam semesta, Yogyakarta: 2002
- Islamy Irfan, 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Joko Widodo 2010, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Pulik*. Malang: Bayu Media.
- Milles Mathew, B. dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Unuversitas Indonesia, Jakarta: 1992
- Soenarko, 2001. *Public Policy. Pengertian pokok untuk mahasiswa dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Airlangga University Press. Surabaya
- Singarimbun Masri, dan Sopyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta: 1989.
- Soekanto Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suharto Edi, 2006. *Membangunan Masyarakat Memberdaya Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*. Bandung PT Refika Aditaman
- Siagian Sondang P, 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi, dan Strategisnya*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Patton Adri, 2004. *Peran Informal Leader Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbatasan Kabupaten Malinau*. Malang: Disertai Program Dokter Ilmu Ekonomi Kekhususan Ilmu Manajemen Publik.
- Yuwono Tegu, 200i. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma baru*, Clogapps Diponegoro Universitys : Semarang.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dokumen-dokumen:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan daerah*.
- Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 *Tentang Pedoman Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah*
- Program Pembangunan Nasional (Propernas) Nomor 25 Tahun 2000-2004 Bab IX, *Tentang pembangunan daerah*.